

Pemulihan Pascabencana Berbasis Komunitas: Integrasi Psychological First Aid dan Pendampingan Legal Aset di Nagari Katapiang

Suci Rahma Nio^{1*}, Nurmina¹, Ali Arben²,

¹Departemen Psikologi, Universitas Negeri Padang

²Program Studi Hukum, Universitas Sumatera Barat

*e-mail: sucirahmanio@fip.unp.ac.id

Abstract

Post-disaster recovery requires attention not only to physical damage but also to psychosocial well-being and the restoration of community access to identity and asset documents. Nagari Katapiang, Batang Anai District, Padang Pariaman Regency, experienced recurrent floods and flash floods that damaged houses and agricultural land, prolonged displacement, and disrupted access to basic services. This community service program aimed to strengthen community psychosocial resilience through cadre-based Psychological First Aid (PFA) and to support the recovery of legal assets through community-based non-litigation assistance. The program used a participatory approach consisting of socialization and needs identification, training and knowledge transfer, implementation of social technology, mentoring and evaluation, and sustainability planning. PFA training covered post-disaster psychological reactions, the Look-Listen-Link principles, empathic communication, role boundaries, calming techniques, and referral mechanisms, while the legal-asset component addressed rights, document recovery procedures, consultation, and administrative assistance. Implementation results reported in the progress report indicate that participants' post-test scores were higher than pre-test scores and that participants were able to practice basic PFA techniques through simulation. The program also produced a PFA training module, pocket guide, evaluation instruments, standard operating procedures, service flow, and a community-based legal-asset assistance model. The findings indicate that strengthening local cadres and providing reusable service tools can establish an important foundation for sustainable psychosocial support and post-disaster administrative and legal recovery at the village level.

Keywords: psychosocial resilience; Psychological First Aid; post-disaster recovery; legal assets; community-based intervention

Abstrak

Pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik, tetapi juga dengan ketahanan psikososial masyarakat serta pemulihan akses terhadap identitas dan dokumen legal aset. Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, merupakan wilayah yang mengalami bencana banjir dan banjir bandang yang berdampak pada kerusakan rumah dan lahan pertanian, pengungsian berkepanjangan, serta terganggunya akses masyarakat terhadap layanan dasar. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat ketahanan psikososial melalui Psychological First Aid (PFA) berbasis kader serta mendukung pemulihan legal aset melalui pendampingan berbasis komunitas. Program menggunakan pendekatan partisipatif yang terdiri atas sosialisasi dan identifikasi kebutuhan, pelatihan dan alih pengetahuan, penerapan teknologi sosial, pendampingan dan evaluasi, serta perencanaan keberlanjutan. Pelatihan PFA mencakup reaksi psikologis pascabencana, prinsip Look-Listen-Link, komunikasi empatik, batasan peran kader, teknik menenangkan diri, dan mekanisme rujukan. Komponen legal aset mencakup hak masyarakat pascabencana, prosedur pemulihan

dokumen, konsultasi, dan pendampingan administratif. Hasil pelaksanaan dalam laporan kemajuan menunjukkan skor post-test lebih tinggi dibandingkan pre-test dan peserta mampu mempraktikkan teknik dasar PFA melalui simulasi. Program juga menghasilkan modul PFA, buku saku, instrumen evaluasi, SOP, alur layanan, dan model pendampingan pemulihan legal aset berbasis komunitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kader dan penyediaan perangkat layanan yang dapat digunakan kembali menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan dukungan psikososial serta pemulihan administratif dan legal masyarakat pascabencana di tingkat nagari.

Kata kunci: ketahanan psikososial; Psychological First Aid; pemulihan pascabencana; legal aset; intervensi berbasis komunitas

1. PENDAHULUAN

Bencana hidrometeorologi dapat menimbulkan dampak yang berlangsung jauh setelah fase tanggap darurat berakhir. Kerusakan rumah, kehilangan sumber penghidupan, pengungsian, dan ketidakpastian masa depan dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis, fungsi sosial, dan kemampuan masyarakat untuk kembali menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam situasi tersebut, pemulihan perlu dipahami sebagai proses yang tidak hanya berorientasi pada rehabilitasi fisik, tetapi juga penguatan kapasitas psikososial dan akses terhadap layanan dasar.

Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, merupakan wilayah yang rawan terhadap banjir dan banjir bandang. Bencana pada akhir 2025 hingga awal 2026 menyebabkan kerusakan rumah, lahan pertanian, gangguan akses transportasi, serta pengungsian berkepanjangan. Data Pemerintah Nagari Katapiang yang tercantum dalam proposal menunjukkan 36 warga mengalami rumah hancur atau hanyut dan 13 warga mengalami kerusakan lahan pertanian. Mayoritas korban berada pada kelompok kesejahteraan rendah desil 1-4 sehingga bencana memperbesar kerentanan sosial ekonomi yang telah ada.

Dampak bencana juga tampak pada aspek psikososial. Warga terdampak mengalami kegelisahan, frustrasi, dan kelelahan emosional selama berada di pengungsian. Anak-anak dilaporkan menunjukkan kecemasan, ketakutan, dan menangis ketika hujan turun karena mengingat pengalaman evakuasi. Perempuan

kepala keluarga, anak-anak, lansia, dan keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah menjadi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan psikososial awal yang mudah diakses, aman, dan dapat diterapkan oleh aktor lokal.

Psychological First Aid (PFA) merupakan pendekatan dukungan psikososial awal yang bersifat non-klinis dan dapat diberikan oleh individu yang telah memperoleh pelatihan sesuai batas perannya. Model Look-Listen-Link digunakan dalam program ini untuk membantu kader memberikan dukungan awal, membangun rasa aman, mengenali kebutuhan, dan menghubungkan warga dengan sumber bantuan yang relevan. Pendekatan ini sejalan dengan pedoman PFA dan prinsip intervensi psikososial pada situasi bencana (World Health Organization, 2011; Inter-Agency Standing Committee, 2007).

Selain kebutuhan psikososial, masyarakat menghadapi persoalan pemulihan dokumen dan legal aset. Bencana menyebabkan dokumen seperti sertifikat tanah, dokumen kepemilikan rumah, dan administrasi kependudukan berisiko rusak atau hilang. Kondisi tersebut dapat menghambat akses terhadap bantuan, layanan publik, dan pemulihan ekonomi. Karena itu, program mengembangkan Klinik Pendampingan Pemulihan Legal Aset Berbasis Komunitas sebagai layanan pendukung yang bersifat edukatif dan non-litigasi.

Program ini menggunakan pendekatan lintas disiplin psikologi dan hukum dengan PFA sebagai solusi utama pada aspek psikososial dan pendampingan legal aset sebagai solusi pendukung. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas kader masyarakat dalam memberikan dukungan psikososial awal, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemulihan dokumen dan legal aset, serta menyediakan perangkat layanan yang dapat digunakan kembali setelah kegiatan selesai. Pendekatan ini juga mendukung SDG 3, SDG 11, dan SDG 16 sebagaimana dirumuskan dalam proposal kegiatan.

2. METODE

Kegiatan dilaksanakan di Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dengan pendekatan partisipatif berbasis komunitas. Mitra dilibatkan sejak tahap persiapan, identifikasi kebutuhan, pelaksanaan pelatihan, praktik, pendampingan, hingga evaluasi. Pendekatan ini dirancang agar masyarakat dan kader tidak hanya menerima informasi, tetapi memperoleh pengalaman untuk memahami, mempraktikkan, dan melanjutkan teknologi sosial setelah kegiatan berakhir.

2.1 Sosialisasi dan Identifikasi Kebutuhan

Sosialisasi dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah nagari, tokoh masyarakat, kader, dan perwakilan warga terdampak. Tahap ini bertujuan membangun kesepahaman mengenai tujuan, manfaat, tahapan, dan peran masing-masing pihak. Identifikasi sasaran diprioritaskan pada kelompok rentan, yaitu lansia, ibu rumah tangga, anak-anak, dan keluarga miskin terdampak bencana. Diskusi lapangan digunakan untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi masyarakat yang dinamis.

2.2 Pelatihan dan Alih Teknologi/Inovasi

Pelatihan PFA diberikan kepada kader dengan materi reaksi psikologis pascabencana, prinsip Look-Listen-Link, komunikasi empatik, batasan etik dan peran kader, teknik menenangkan diri, serta mekanisme rujukan. Metode pembelajaran menggunakan ceramah singkat, diskusi, praktik, dan simulasi/role play. Pada aspek legal aset, penyuluhan membahas hak masyarakat pascabencana, jenis dokumen yang dapat dipulihkan, serta prosedur administratif pemulihan dokumen dan legalitas aset.

2.3 Penerapan Teknologi Sosial

Teknologi yang diterapkan merupakan teknologi sosial berbasis pengetahuan terapan. Produk utama terdiri atas model PFA berbasis kader yang didukung modul, instrumen pre-test dan post-test, SOP, poster/brosur, dan video psikoedukasi; serta model Klinik Pendampingan Pemulihan Legal Aset yang didukung buku saku, alur layanan, format pendampingan administratif, dan media edukasi. Penerapan dilakukan

melalui praktik PFA, konsultasi, identifikasi kebutuhan dokumen, dan pendampingan administratif.

2.4 Pendampingan, Evaluasi, dan Keberlanjutan

Pendampingan dilakukan untuk memperkuat penerapan PFA oleh kader dan mendukung masyarakat dalam konsultasi serta proses pemulihan legal aset. Evaluasi meliputi keterlaksanaan kegiatan, partisipasi mitra, perubahan pengetahuan melalui pre-test dan post-test, kemampuan praktik PFA melalui simulasi, kebutuhan rujukan, serta kebutuhan pendampingan dokumen. Keberlanjutan diarahkan melalui pemanfaatan modul, buku saku, SOP, instrumen evaluasi, penguatan jejaring rujukan, dan pendampingan berkala.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Awal dan Kebutuhan Mitra

Hasil asesmen yang menjadi dasar program menunjukkan bahwa persoalan pascabencana di Nagari Katapiang memiliki dimensi psikologis dan administratif-hukum yang saling berkaitan. Pengungsian berkepanjangan dan ketidakpastian hunian meningkatkan tekanan psikologis, sementara kerusakan atau kehilangan dokumen menghambat akses terhadap bantuan dan pemulihan. Dengan demikian, intervensi yang hanya berorientasi pada pemulihan fisik belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.

Modal sosial nagari menjadi kekuatan penting. Nagari memiliki pemerintahan, kader, lembaga sosial, dan jejaring masyarakat yang dapat digunakan sebagai basis pemulihan. Namun, kapasitas kader dalam memberikan dukungan psikososial awal belum dikembangkan secara sistematis. Di sisi legal aset, masyarakat membutuhkan informasi dan pendampingan administratif yang mudah diakses di tingkat komunitas. Temuan tersebut menjadi dasar pemilihan PFA berbasis kader dan Klinik Pendampingan Pemulihan Legal Aset sebagai dua komponen intervensi.

3.2 Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan PFA

Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa pelatihan tidak berhenti pada penyampaian materi. Peserta memperoleh pengalaman praktik melalui simulasi, termasuk latihan pernapasan dan teknik menenangkan diri. Evaluasi pembelajaran menunjukkan skor post-test lebih tinggi dibandingkan skor pre-test, yang mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman setelah pelatihan. Peserta juga mampu mempraktikkan teknik dasar PFA dalam simulasi.

Temuan ini penting karena kapasitas kader dalam PFA merupakan salah satu bentuk penguatan sumber daya lokal. Kader dapat menjadi penghubung awal antara warga yang mengalami tekanan psikososial dan sumber dukungan yang lebih tepat, sepanjang bekerja sesuai batas kompetensi dan menggunakan mekanisme rujukan. Prinsip ini sesuai dengan PFA yang menekankan bantuan awal yang aman, praktis, dan tidak menggantikan layanan profesional (World Health Organization, 2011).



Gambar 1. Simulasi PFA



Gambar 2. Penutupan Pendampingan Legal Aset

Secara konseptual, penguatan kapasitas kader juga mendukung elemen intervensi psikososial yang menekankan rasa aman, ketenangan, koneksi sosial, efikasi diri/komunitas, dan harapan. Lima elemen tersebut merupakan bagian penting dalam respons terhadap pengalaman traumatis dan dapat menjadi dasar penguatan dukungan komunitas setelah bencana (Hobfoll et al., 2007).

Tabel 1. Capaian penguatan kapasitas PFA berdasarkan laporan kemajuan.

Komponen	Hasil Pelaksanaan	Bukti/Capaian
Pengetahuan PFA	Pemahaman peserta meningkat setelah pelatihan	Post-test lebih tinggi daripada pre-test
Keterampilan dasar	Peserta mempraktikkan teknik dasar PFA	Simulasi latihan pernapasan dan teknik menenangkan diri
Penerapan prinsip	Peserta memahami Look-Listen-Link, komunikasi empatik, batas peran, dan	Praktik dan diskusi kasus

	rujukan	
Perangkat pembelajaran	Tersedia modul dan buku saku	Dapat digunakan kembali oleh mitra

3.3 Penerapan PFA sebagai Teknologi Sosial Berbasis Kader

Program menempatkan PFA bukan sekadar sebagai materi pelatihan, tetapi sebagai teknologi sosial yang dapat diterapkan oleh kader di lingkungan masyarakat. Teknologi tersebut terdiri atas pengetahuan, prosedur, keterampilan komunikasi, teknik regulasi sederhana, dan mekanisme rujukan yang dikemas dalam modul dan SOP. Model seperti ini memiliki nilai keberlanjutan karena pengetahuan tidak berhenti pada fasilitator, tetapi ditransfer kepada aktor lokal.

Laporan kemajuan menunjukkan bahwa kader diperkenalkan pada penerapan PFA sesuai batas kompetensinya dan pada pentingnya rujukan apabila masyarakat membutuhkan bantuan lebih lanjut. Dengan demikian, fungsi kader lebih tepat diposisikan sebagai pemberi dukungan psikososial awal dan penghubung menuju layanan yang sesuai, bukan sebagai pengganti psikolog atau tenaga profesional lainnya.

3.4 Penguatan Pemulihan Legal Aset Berbasis Komunitas

Komponen kedua program memberikan penguatan pemahaman mengenai hak masyarakat pascabencana, dokumen yang dapat dipulihkan, serta prosedur administratif untuk memperoleh kembali dokumen kependudukan dan legal aset yang rusak atau hilang. Hasil pelaksanaan memberikan pemahaman awal kepada mitra mengenai pentingnya dokumen kependudukan dan legalitas aset serta langkah administratif dan pihak yang dapat dihubungi untuk pendampingan lebih lanjut.

Model Klinik Pendampingan Pemulihan Legal Aset dikembangkan sebagai layanan hukum non-litigasi yang berfokus pada konsultasi, identifikasi kebutuhan dokumen, informasi prosedur, dan pendampingan administratif. Pendekatan ini penting karena masyarakat pascabencana tidak selalu membutuhkan proses litigasi; kebutuhan awal sering kali berupa informasi, klarifikasi, identifikasi dokumen, dan penghubungan

dengan instansi yang berwenang. Dalam kerangka legal empowerment, kemampuan masyarakat memahami hak dan menavigasi mekanisme layanan merupakan bagian dari penguatan akses terhadap keadilan (United Nations Development Programme, 2022).

Perangkat yang dihasilkan berupa buku saku pemulihan legal aset, alur layanan, formulir identifikasi kebutuhan, dan mekanisme rujukan. Laporan kemajuan menunjukkan bahwa perangkat tersebut telah menyediakan dasar mekanisme layanan yang dapat digunakan mitra setelah program selesai. Capaian ini penting sebagai fondasi, tetapi belum dapat dipersamakan dengan bukti bahwa seluruh dokumen masyarakat telah berhasil dipulihkan.

3.5 Integrasi Psikososial dan Legal Aset dalam Pemulihan Komunitas

Keunikan program terletak pada integrasi dua kebutuhan pascabencana yang sering ditangani secara terpisah. Tekanan psikologis dapat diperberat oleh ketidakpastian tempat tinggal, kehilangan sumber penghidupan, dan ketidakpastian dokumen. Sebaliknya, proses pemulihan administrasi dan legal aset membutuhkan kapasitas psikososial agar masyarakat mampu mengikuti prosedur, mengambil keputusan, dan mengakses layanan.

Integrasi dalam program tidak berarti mencampurkan kewenangan psikologi dan hukum, tetapi membangun mekanisme dukungan yang saling melengkapi. Kader PFA memberikan dukungan psikososial awal dan melakukan rujukan ketika diperlukan, sedangkan komponen legal aset menyediakan informasi dan pendampingan administratif. Jejaring dengan layanan profesional dan instansi berwenang tetap diperlukan untuk kasus yang berada di luar kompetensi kader atau tim pengabdian.

3.6 Produk dan Luaran Teknologi

Luaran implementasi menunjukkan bahwa program menghasilkan perangkat yang dapat memperpanjang manfaat kegiatan. Produk yang telah dicapai meliputi modul pelatihan PFA, buku saku pemulihan legal aset, instrumen pre-test dan post-test, lembar

observasi dan rubrik simulasi, SOP dan alur layanan, penerapan PFA berbasis kader, serta model pendampingan pemulihan legal aset berbasis komunitas.

Tabel 2. Produk dan luaran implementasi teknologi sosial.

Luaran	Status dalam Laporan Kemajuan	Fungsi
Peningkatan pengetahuan/keterampilan kader PFA	Tercapai	Dasar penerapan dukungan psikososial awal
Modul PFA	Tercapai	Bahan pelatihan dan panduan kader
Buku saku legal aset	Tercapai	Panduan praktis pemulihan dokumen
Instrumen evaluasi dan praktik	Tersedia	Mengukur pengetahuan dan praktik
SOP dan alur layanan	Tersedia	Menstandarkan pelaksanaan layanan
Model pendampingan legal aset	Terlaksana	Layanan hukum non-litigasi berbasis komunitas

3.7 Keberlanjutan Program

Keberlanjutan menjadi bagian penting karena pelatihan satu kali belum menjamin keterampilan tetap digunakan. Program telah menyediakan modul, buku saku, SOP, instrumen evaluasi, dan jejaring rujukan sebagai perangkat pascakegiatan. Tahap lanjutan perlu diarahkan pada pendampingan berkala, monitoring keterlaksanaan PFA, pemanfaatan perangkat secara rutin, serta penguatan jejaring antara kader, pemerintah nagari, layanan kesehatan, lembaga sosial, dan instansi yang berwenang.

Pada aspek legal aset, monitoring perlu diarahkan pada jenis dokumen yang membutuhkan pemulihan, proses administrasi yang sedang berlangsung, serta hambatan masyarakat dalam mengakses layanan. Pada aspek psikososial, evaluasi dapat dikembangkan dari sekadar peningkatan pengetahuan menuju keterampilan praktik, jumlah dan karakteristik warga yang menerima dukungan, kebutuhan rujukan,

serta perubahan indikator psikososial yang relevan. Pengembangan indikator tersebut akan memperkuat bukti efektivitas program pada tahap berikutnya.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian di Nagari Katapiang telah memberikan dasar penguatan ketahanan psikososial dan pemulihan legal aset pascabencana melalui pendekatan berbasis komunitas dan lintas disiplin psikologi-hukum. Pada aspek psikososial, pelatihan PFA berbasis kader meningkatkan pemahaman peserta yang ditunjukkan oleh skor post-test lebih tinggi dibandingkan pre-test serta kemampuan mempraktikkan teknik dasar PFA melalui simulasi. Program juga menghasilkan modul PFA, buku saku, instrumen evaluasi, SOP, dan perangkat pendukung yang dapat digunakan kembali. Pada aspek legal aset, kegiatan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak pascabencana, pemulihan dokumen, prosedur administratif, dan akses pendampingan melalui model Klinik Pendampingan Pemulihan Legal Aset Berbasis Komunitas. Secara keseluruhan, program telah membangun fondasi kapasitas lokal dan perangkat layanan yang mendukung keberlanjutan pemulihan masyarakat. Namun, capaian tahap ini belum dapat diposisikan sebagai bukti dampak jangka panjang; pengukuran lanjutan terhadap keterampilan kader, pemanfaatan layanan, kebutuhan rujukan, pemulihan dokumen, dan perubahan kondisi psikososial masih diperlukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Kontrak Kemendiktisaintek dengan dengan Universitas Negeri Padang dengan Nomor 070/C3/DT.05.00/PM/2026 tanggal 13 April 2026. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Negeri Padang, masyarakat Nagari Katapiang, dan seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. (2021). Strengthening community resilience after disaster. Asian Development Bank.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). Peta risiko bencana Indonesia. BNPB.
- Hobfoll, S. E., Watson, P., Bell, C. C., Bryant, R. A., Brymer, M. J., Friedman, M. J., Friedman, M., Gersons, B. P. R., de Jong, J. T. V. M., Layne, C. M., Maguen, S., Neria, Y., Norwood, A. E., Pynoos, R. S., Reissman, D., Ruzek, J. I., Shalev, A. Y., Solomon, Z., Steinberg, A. M., & Ursano, R. J. (2007). Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: Empirical evidence. *Psychiatry*, 70(4), 283–315. <https://doi.org/10.1521/psyc.2007.70.4.283>
- Inter-Agency Standing Committee. (2007). IASC guidelines on mental health and psychosocial support in emergency settings. IASC.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). Penguatan ketangguhan desa dalam penanggulangan bencana. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
- Komnas HAM. (2024). Hak atas identitas dan perlindungan hukum korban bencana. Komnas HAM.
- Namati. (2017). Legal empowerment practitioners' guide. Namati.
- Nio, S. R., Rusli, D., Wibawa, A. D., Zahra, N. M., et al. (2024). Pelatihan komunikasi asertivitas seksual guna mencegah terjadinya tindakan seks bebas pada siswa SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. *PUSAKO: Jurnal Pengabdian Psikologi*, 3(2), 1–6. <https://doi.org/10.24036/pusako.v3i2.95>
- Nio, S. R., Rusli, D., Damra, H. R., & Arben, A. (2025). Pelatihan ESQ untuk pencegahan perilaku seks bebas bagi remaja di Nagari Tiku Selatan Kabupaten Agam. *PUSAKO: Jurnal Pengabdian Psikologi*, 4(1), 26–34. <https://doi.org/10.24036/pusako.v4i01.141>
- Nurmina, N., Netrawati, N., & Rinaldi, R. (2020). Pelatihan manajemen stres dan relaksasi bagi ibu rumah tangga terdampak Covid-19 di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang. *PLAKAT (Pelayanan Kepada Masyarakat)*, 2(2), 150. <https://doi.org/10.30872/plakat.v2i2.4972>
- United Nations Development Programme. (2022). Legal recovery after disaster. UNDP.
- World Health Organization. (2011). Psychological first aid: Guide for field workers. WHO.